

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO PADA MASA
PANDEMI *COVID-19* DI KELURAHAN SEI
SIKAMBING B KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

RUT ROYANTI SIANTURI

178520064



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO PADA MASA
PANDEMI *COVID-19* DI KELURAHAN SEI
SIKAMBING B KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area



Oleh:

RUT ROYANTI SIANTURI

178520064

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Sembako Pada Masa Pandemi
COVID-19 di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan.
Nama : Rut Royanti Sianturi
NPM : 178520064
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP



Nina Angelia, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ka. Prodi



Dr. Heri Kusmanto, MA



Nina Angelia, S.Sos, M.Si

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2021



Rut Royanti Sianturi
178520064

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

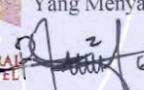
Nama : Rut Royanti Sianturi
NPM : 178520064
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-free Right)** atas karya saya yang berjudul : **“Implementasi Program Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Juni 2021
Yang Menyatakan

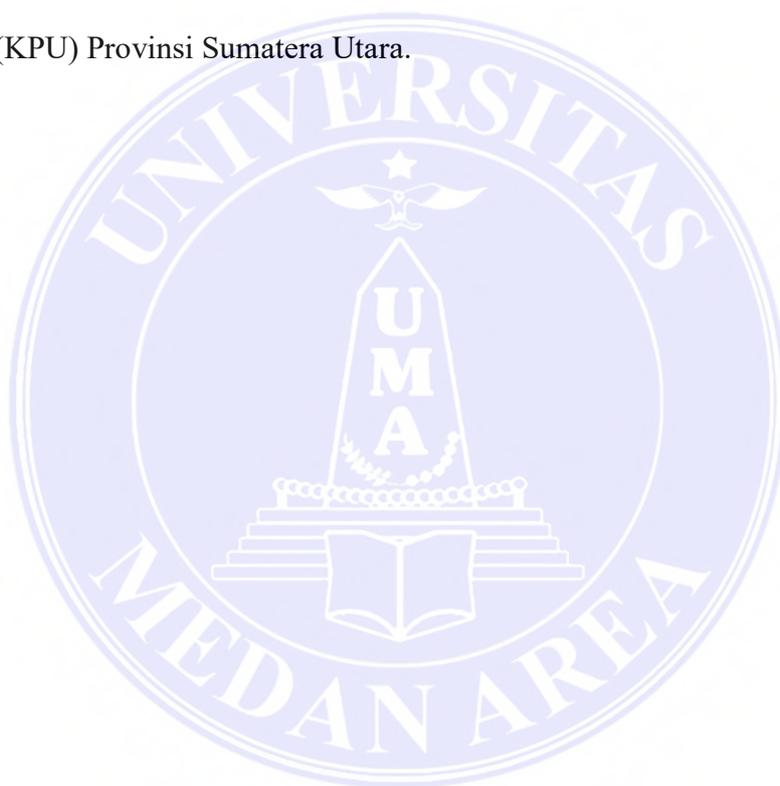

Rut Royanti Sianturi
178520064

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Perdagangan Pada tanggal 12 April 2000 dari ayah H.Sianturi dan ibu R.Sitinjak. Penulis merupakan putri Ke 6 dari 6 bersaudara.

Tahun 2017 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Bandar Perdagangan dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIKELURAHAN SEI SIKAMBING B KOTA MEDAN

Permasalahan pada penelitian ini adalah ditemukannya masyarakat terdampak covid-19 namun belum mendapatkan bantuan sembako, kurangnya pemerataan pembagian serta pendataan yang tidak relevan dengan data lapangan karena data yang digunakan adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang masih menggunakan data yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program sembako serta hambatan yang terjadi pada program sembako di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Edward III. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Berikut diuraikan hasil penelitian yaitu Implementasi program sembako pada masa pandemi covid-19 dikelurahan sei sikambing b kota medan belum berjalan dengan efektif dan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sosialisasi kepada masyarakat yang hanya dilakukan sekali dalam setahun, lalu penggunaan data KPM yang belum update karena masih menggunakan data yang lama sehingga KPM yang sudah pindah domisili bahkan yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan sembako tersebut. Jumlah KPM yang mengalami perubahan dikarenakan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Dan sumber daya manusia ditempat pengambilan sembako masih kurang karna hanya beranggotakan 5 orang saja.

Kata Kunci : Implementasi, Program Sembako

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE BASIC FOOD PROGRAM DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE SEI SIKAMBING B VILLAGE MEDAN CITY

The problem in this study is the discovery of people affected by Covid-19 but not getting basic food assistance, the lack of equal distribution and data collection that is not relevant to field data because the data used is integrated sosial welfare data which still uses old data. This study aims to determine the implementation of the basic food program and obstacles that occur in the basic food program in Sei Sikambing B Village, Medan City. This study uses the Edward III implementation model. The type of research used by researchers is qualitative research, with techniques and data collection through observation, interviews, documentation and triangulation. The following describes the results of the study, namely the implementation of the basic food program during the covid-19 pandemic in the sei sikambing b village, Medan City, which has not been running effectively and optimally. This can be seen from the socialization to the community which is only done once a year, then the use of beneficiary family data that has not been updated because it is still old data so that beneficiary family who have moved domicile even those who have died still receive the basic food assistance. The number of beneficiary family that has changed is due to the fact that is must be adjusted to the state's finansial capacity. And human resources at the place where the basic food is taken are still lacking, only 5 members.

Keywords: Implementation, Basic Food Program.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, Adapun Judul dari penelitian ini adalah “Implementasi Program Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata (S-1) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Medan Area.

Peneliti menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada, sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

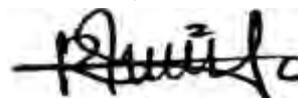
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Teristimewa orang tua tercinta Hotman Sianturi dan Rolenta Sitingjak. Serta abang dan kakak saya tersayang Indra Yosua Sianturi, Feryanto Sianturi, Herman Fransisco Sianturi, Robinson Sianturi, Eva Lusiana Sianturi, kakak ipar saya Apriliani Hanur, Ervina Situmorang dan Keponakan saya Aisyah Gizka Ulindra Sianturi, Buna Priscilla Sianturi, Mecca Marisha Sianturi.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini, terimakasih atas masukan dan saran yang telah diberikan selama bimbingan.

5. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini, terimakasih atas masukan dan saran yang telah diberikan selama bimbingan.
6. Ibu Riri Rezeki Hariani S.Sos, MAP Selaku Sekretaris yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini, terimakasih atas masukan dan saran yang telah diberikan selama bimbingan.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terkhusus dosen Program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
8. Kantor Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan yang telah memberi saya kesempatan melakukan riset dan membantu memberikan informasi yang saya butuhkan selama penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman sealmamater angkatan tahun 2017 terkhusus Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Mengingat Keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Medan, 18 Juni 2021

Peneliti,



Rut Royanti Sianturi
NPM: 178520064

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1.Implementasi Kebijakan Publik	6
2.1.1. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	7
2.1.2. Faktor Utama Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	8
2.1.3. Tingkatan Dalam Kebijakan Publik	8
2.2.Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	10
2.3.Program Sembako	14
2.3.1.Peraturan Presiden RI Nomer 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara NonTunai	14
2.3.2.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	15
2.3.3. Pengertian Program Sembako	17
2.3.4. Tujuan Program Sembako	17
2.3.5. Manfaat Program Sembako	18
2.3.6. Prinsip Pelaksanaan Program Sembako	18
2.3.7. Pagu Program Sembako	19
2.3.8. Sumber Data Keluarga Penerima Manfaat Sembako	20
2.3.9. Kriteria Masyarakat Penerima Sembako	20
2.3.10. Besaran Manfaat Sembako	21
2.3.11. Bahan Pangan Sembako	21
2.4.Penelitian Terdahulu	22
2.5.Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1.Jenis Penelitian	26
3.2.Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.3.Sumber Data	27
3.4.Teknik Pemilihan Informan	28
3.5.Teknik Pengumpulan Data	29
3.6.Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1. Kondisi Geografis Kelurahan Sei Sikambing B.....	35
4.1.2. Kondisi Demografis Kelurahan Sei Sikambing B.....	36
4.1.3. Visi dan Misi Kelurahan Sei Sikambing B.....	39
4.1.4. Struktur Organisasi Kelurahan Sei Sikambing B	40
4.1.5. Tugas Dan Fungsi Kelurahan Sei Sikambing B.....	41
4.2. Mekanisme Pelaksanaan.....	45
4.2.1. Koordinasi Pelaksanaan.....	45
4.2.2. Pembukaan Rekening Kolektif.....	46
4.2.3. Penyiapan E-Warong.....	47
4.2.4. Penyaluran Dana Bantuan	48
4.2.5. Pemanfaatan Program Sembako.....	48
4.3. Implementasi Program Sembako di Kelurahan Sei Sikambing B.....	49
4.3.1. Komunikasi Dalam Implementasi Program Sembako.....	50
4.3.2. Sumber Daya Dalam Implementasi Program Sembako	53
4.3.3. Disposisi Dalam Implementasi Program Sembako	56
4.3.4. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Program Sembako	57
4.4. Faktor Penghambat Implementasi Program Sembako.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
5.1. KESIMPULAN	63
5.2. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Perbandingan	13
Tabel 3.1. Jadwal dan Waktu Penelitian	27
Tabel 4.1. Data Perangkat Kelurahan Sei Sikambang B	36
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk	37
Tabel 4.3. Jumlah Mutasi Penduduk	37
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Miskin	38
Tabel 4.6. Jumlah Penerima Program Sembako Tahun 2020	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Implementasi George C Edward III.....	12
Gambar 2.2. Kerangka Berfikir.....	25
Gambar 3.1. Triangulasi Metode	32
Gambar 4.1. Struktur Organisasi.....	40



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini ingin mengkaji Implementasi dalam program pengentasan kemiskinan yaitu Program sembako pada masa pandemi *COVID-19*. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit karna inveksi virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Meningkatnya kasus *COVID-19* di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat melakukan *social/physical distancing* hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penularan *COVID-19*. Dampak dari adanya pandemi *COVID-19* sangat besar terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, masyarakat sangat membutuhkan insentif dari pemerintah. Bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat di era pandemi ini adalah bantuan tunai dan bantuan sembako karena masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang cukup signifikan.

Menurut (Pedoman Umum, 2020 : 10) Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Program Sembako sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh

ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada tahun 2020 program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT.

Untuk program sembako, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT, namun juga komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Keluarga Penerima Manfaat, yang selanjutnya disebut dengan KPM, adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program Sembako.

Tujuan Program sembako adalah Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Prinsip utama dalam pelaksanaan Program Sembako adalah sebagai berikut:

(a) Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, dan kualitas bahan pangan serta *e-Warong*; (b) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada *e-Warong* maupun Agen BRI Link terdekat

(c) E-Warong tidak memaketkan bahan pangan (d) *E-Warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM; (e) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (f) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kelurahan sei sikambang b adalah salah satu kelurahan yang ada di kota medan yang terdampak covid-19, untuk itu masyarakat membutuhkan bantuan salah satunya adalah bantuan sembako. Di kelurahan sei sikambang b diketahui bahwa program sembako keberadaannya masih belum dipahami masyarakat, sehingga masih ditemukannya masyarakat yang terdampak *covid-19* namun belum mendapatkan bantuan sembako, lalu kurangnya pemerataan pembagian serta pendataan yang tidak relevan dengan data lapangan karna masih banyak masyarakat yang belum terdata dari dinas dan data yang digunakan adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang masih menggunakan data yang lama yakni 2015.

Berikut jumlah data masyarakat penerima bantuan sebelum dan sesudah pandemi *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambang B. Diketahui bahwa jumlah masyarakat sebelum pandemi *COVID-19* sebanyak 536 KPM, sedangkan jumlah masyarakat sesudah pandemi *COVID-19* dengan data yang diperoleh dibulan februari 2021 adalah sebanyak 631 KPM, bertambahnya jumlah masyarakat penerima bantuan kurang lebih sebanyak 95 orang.

Berikut jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sebelum dan sesudah pandemi *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambang B. Diketahui bahwa jumlah bantuan yang diterima masyarakat sebelum pandemi *COVID-19* sebanyak 150.000/KPM/Bulan, sedangkan jumlah bantuan yang diterima masyarakat masa pandemi *COVID-19* sebanyak 200.000/KPM/Bulan, bertambahnya jumlah bantuan yang diterima masyarakat kurang lebih sebanyak 50.000/KPM/Bulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Sembako pada masa pandemi *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Program sembako pada masa pandemi *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan

Apa yang menjadi hambatan pada Program sembako pada masa pandemi *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan?

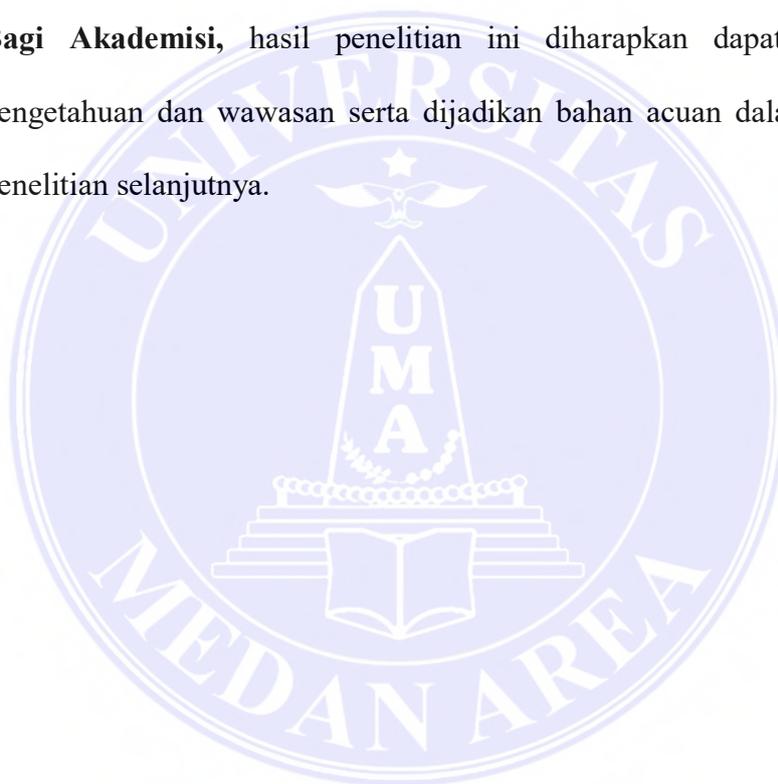
1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui implementasi Program sembako pada masa pandemi *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada Program sembako pada masa pandemi *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak :

1. **Bagi Peneliti**, menambah wawasan serta pengetahuan mengenai implementasi program sembako pada masa pandemi *COVID-19*.
2. **Bagi Instansi**, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan implementasi program sembako.
3. **Bagi Akademisi**, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Indra Muda, 2019 :76) Implementasi dalam studi kebijakan publik bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi implementasi juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan publik, oleh karna itu dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Menurut Gordon dalam buku (Deddy Mulyadi, 2018 : 24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

2.1.1. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Zainal Abidin dalam buku (Deddy Mulyadi, 2018 : 25-26) terdapat pendekatan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan sebagai berikut :

Planning of change yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi dan *Planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan *prosedural/manajerial*

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/*behavior*

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

2.1.2. Faktor Utama Proses Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Zainal Abidin dalam buku (Deddy Mulyadi, 2018 : 26) Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama; Faktor utama internal dan faktor utama eksternal.

1. Faktor utama internal yaitu berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan.
2. Faktor utama eksternal yaitu berkaitan dengan kondisi lingkungan dari pihak terkait dalam implementasi kebijakan tersebut.

2.1.3. Tingkatan Dalam Kebijakan Publik

Tingkatan kebijakan publik menurut Thomas R.Dye dalam buku (Deddy Mulyadi, 2018 : 36-39) adalah “*Whatever Governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dalam buku (Deddy Mulyadi, 2018:38-39) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: Pertama kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kedua kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan

pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Ketiga kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Adapun contoh jenis kebijakan dalam tingkatan kebijakan publik sebagai berikut:

1) Kebijakan umum

Kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional, Wewenang; Presiden bersama-sama dengan DPR dan DPD, dan Bentuk: UUD, UU, Perpu

2) Kebijakan Pelaksana

Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UU, TAP MPR dan Perpu guna mencapai tujuan, Wewenang Presiden, dan Bentuk: PP, Kepres, Inpres

3) Kebijakan teknis

Sebagai penjabaran dan kebijakan umum sebagai strategis pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Wewenang, Mentri, Pejabat setingkat Mentri/LNPK, dan Bentuk : Keputusan, Peraturan, Intruksi pejabat tertentu .

Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-

kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

2.2. Model Implementasi Kebijakan – George C. Edward III

Model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward dalam (Dwiyanto Indiahono, 2018 : 28) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut :

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/ kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalam implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan

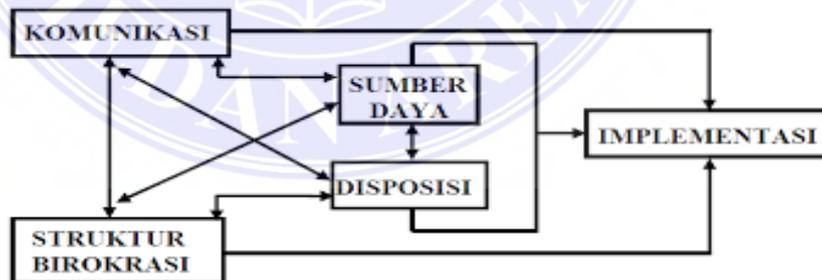
program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/ kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari

hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, impementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Model dari George C Edward III ini dalam dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Model Implementasi George C Edward III



Sumber : Indiahono (2009)

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya adalah empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra

fenomena implementasi kebijakan publik. Aplikasi model ini dalam kajian perbandingan implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Perbandingan

Hal Yang Dibandingkan	Ruang Lingkup
Komunikasi	a. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program/ kebijakan? b. Bagaimana sosialisasi program/ kebijakan efektif dijalankan? <ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan • Intensitas Komunikasi
Sumber Daya	a. Kemampuan implementor <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan • Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program • Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan b. Ketersediaan Dana <ul style="list-style-type: none"> • Berapa dana yang dialokasikan • Pradiksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/ kebijakan.
Disposisi	Karakter pelaksana <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat komitmen dan kejujuran: dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan guideline semakin tinggi komitmennya. • Tingkat demokratis, dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b. Struktur organisasi <ul style="list-style-type: none"> • Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program.

Sumber : Indiahono (2009)

2.3. Program Sembako

2.3.1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Dan pada pasal 2 menjelaskan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Pada Pasal 3 ayat 1 sampai 4 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa ayat 1 “Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial”. Ayat 2 berbunyi “Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum Milik Negara”. Pada ayat 3 berbunyi “Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial”. Dan ayat 4 berbunyi “Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Kombo”.

Pada pasal 4 ayat 1 sampai 4 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

menjelaskan bahwa ayat 1 berbunyi “Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial”. Ayat 2 “Besarnya manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga”. Serta ayat 3 berbunyi “Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi: penyandang disabilitas berat; lanjut usia terlantar non potensial; eks penderita penyakit kronis non potensial; Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai”.

2.3.2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kesatu : Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Kedua : Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Ketiga : Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Keempat : Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah: a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong,

Kecamatan Gunung Putri, - 5 - Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup; c. Pemerintah Daerah Kota Depok; d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang; e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Kelima : Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat. Keenam : Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Ketujuh : Penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kedelapan : Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial sembako kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kesembilan : Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Kesepuluh : Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako berasal dari usulan: a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; b. Pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor oleh Bupati Bogor; c. Pemerintah Daerah Kota Depok oleh Wali Kota Depok; d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang oleh Wali Kota Tangerang;- 6 - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan; dan f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi.

Kesebelas : Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai. Kedua Belas : Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Ketiga Belas : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

2.3.3. Pengertian Program Sembako

Menurut (Pedoman Umum, 2020 : 10) Program Sembako adalah pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

2.3.4. Tujuan Program Sembako

Tujuan Program Sembako dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan kebutuhan pangan; Kedua, Memberikan gizi yang lebih seimbang

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Ketiga, Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan Keempat Memberikan pilihan dan kendali terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

2.3.5. Manfaat Program Sembako

Manfaat Program Sembako dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama; Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Kedua; Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial; Ketiga; Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; Keempat; Meningkatnya transaksi nontunai, kelima; Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Keenam; Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2.3.6. Prinsip Pelaksanaan Program Sembako

Pelaksanaan Program Sembako harus memenuhi prinsip:

1. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas bahan pangan serta *e-Warong* maupun Agen BRILink;
2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada *e-Warong* maupun Agen BRILink terdekat;
3. *E-Warong* tidak boleh memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak sehingga KPM tidak mempunyai pilihan terhadap bahan pangan ;

4. *E-Warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya bahan pangan serta kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;
5. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan
7. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); dan
8. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPNT sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

2.3.7. Pagu Program Sembako

Pagu program Sembako kabupaten/kota merupakan jumlah KPM di setiap kabupaten/kota. Menteri Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang jumlah Keluarga penerima Manfaat (KPM) untuk setiap kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah pagu/jumlah penerima manfaat program Sembako bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM, namun terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mekanisme program Sembako dengan pembiayaan APBD dapat disesuaikan dengan mekanisme penyaluran program Sembako dengan pembiayaan APBN.

2.3.8. Sumber Data Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako

Data penerima bantuan sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksana disebut KPM, yang namanya termasuk dalam daftar penerima manfaat (DPM) dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar Penerima Manfaat (DPM) bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota kemudian dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) menu BSP.

DPM kemudian diserahkan ke Dinas Sosial daerah masing-masing yang dikeluarkan ke kantor kecamatan lalu diarahkan ke kelurahan selanjutnya dikoordinasikan ke kepala lingkungan masing-masing, setelah itu kepala lingkungan masing-masing mengkoordinasikan kepada KPM untuk pembuatan bank penyaluran bantuan yang disebut KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) berfungsi sebagai alat transaksi untuk boleh mengambil bantuan tersebut di e-warung maupun Agen BRILink terdekat.

2.3.9. Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Program Sembako

Penerima Manfaat program sembako atau biasa disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang penghasilannya dibawah UMR, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak menerima bantuan dari program lain.

Untuk penerima manfaat program Sembako adalah keluarga. Namun, untuk kebutuhan penyaluran manfaat program Sembako perlu ditentukan satu (1) nama dalam KPM sebagai Pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening bantuan pangan.

2.3.10. Besaran Manfaat

Besaran manfaat yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada awal program yaitu BPNT tahun 2017 - 2018 adalah 110.000/KPM/Bulan. Kemudian terjadi kenaikan jumlah bantuan kisaran 40.000/KPM/Bulan sehingga menjadi Rp150.000/KPM/bulan. Namun pada masa pandemi *Covid-19* bertambah jumlah bantuan senilai 50.000/KPM/bulan sehingga jumlah yang diterima masyarakat pada masa pandemi covid-19 adalah 200.000/KPM/Bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong maupun Agen BRI Link.

2.3.11. Bahan Pangan

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong maupun Agen BRI Link adalah Sumber karbohidrat seperti beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu. Sumber protein hewani seperti telur, daging sapi, ayam, ikan. Sumber protein nabati seperti kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu serta Sumber vitamin dan mineral seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Bahan pangan yang tidak boleh digunakan untuk pembelian adalah minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan, menemukan inspirasi baru serta memperkaya teori yang digunakan dan menjadi salah satu acuan peneliti untuk penelitian selanjutnya. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan Hidayat Panuntun Muslim pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai belum dapat dijalankan sesuai SOP yang ada dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memahami program BPNT. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan belum berjalan dengan baik maka berpengaruh kepada pelaksanaan Program BPNT sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak dapat tercapai secara maksimal; Kedua, Sumber Daya, terdapat kendala yaitu pada sumber daya anggota yaitu ditemukan bahwa aparat dari Kelurahan serta Tenaga Pendamping belum terlibat dalam pelaksanaan Program BPNT. Maka dari itu jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada seperti sumber daya anggota yang ada belum memadai. Ketiga, Disposisi, disposisi petugas dalam pelaksanaan Program BPNT masih kurang baik, karena belum adanya keinginan dari pemerintah terutama pemerintahan Kelurahan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program BPNT. Keempat, Struktur Birokrasi,

prosedur pelayanan dan struktur organisasi dalam pelaksanaan Program BPNT cukup rumit.

Perbedaan antara skripsi saya dengan penelitian yang dilakukan Hidayat Panuntun Muslim adalah pada penelitian Hidayat nama programnya masih BPNT sedangkan pada penelitian saya program tersebut telah ditransformasikan menjadi Program Sembako dimana tidak hanya nama saja yang berubah melainkan jenis komoditasnya dan juga besaran jumlah bantuannya bertambah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan teori implementasi dari Edward III dan menggunakan penelitian kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan Azlan Suhaini pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dinas Sosial Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Program bantuan pangan non tunai Dan berdasarkan hasil pembahasan dan analisa peneliti pada penelitian Implementasi program bantuan pangan non tunai ini Program Bantuan Pangan Non Tunai di laksanakan secara struktur, dari mensosialisasikan sampai pemberian pemahaman ke masyarakat. Kedua, Program Bantuan Pangan Non Tunai, dalam perbaikan kecukupan pangan masyarakat sangat terbantu , walaupun tidak seluruh terpenuhi, tetapi bisa membantu mencukupi pangan masyarakat dalam kehidupan sehari- hari. Jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 110.000/bulan tetapi tidak bisa di uangkan melainkan ditukarkan ke bahan pangan dengan kualitas standar. Ketiga, Program Bantuan Pangan Non Tunai, sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang menerima, walaupun tidak sepenuhnya berubah

dalam segi ekonomi masyarakat, akan tetapi mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Keempat, Program Bantuan Pangan Non Tunai terimplementasikan secara struktur.

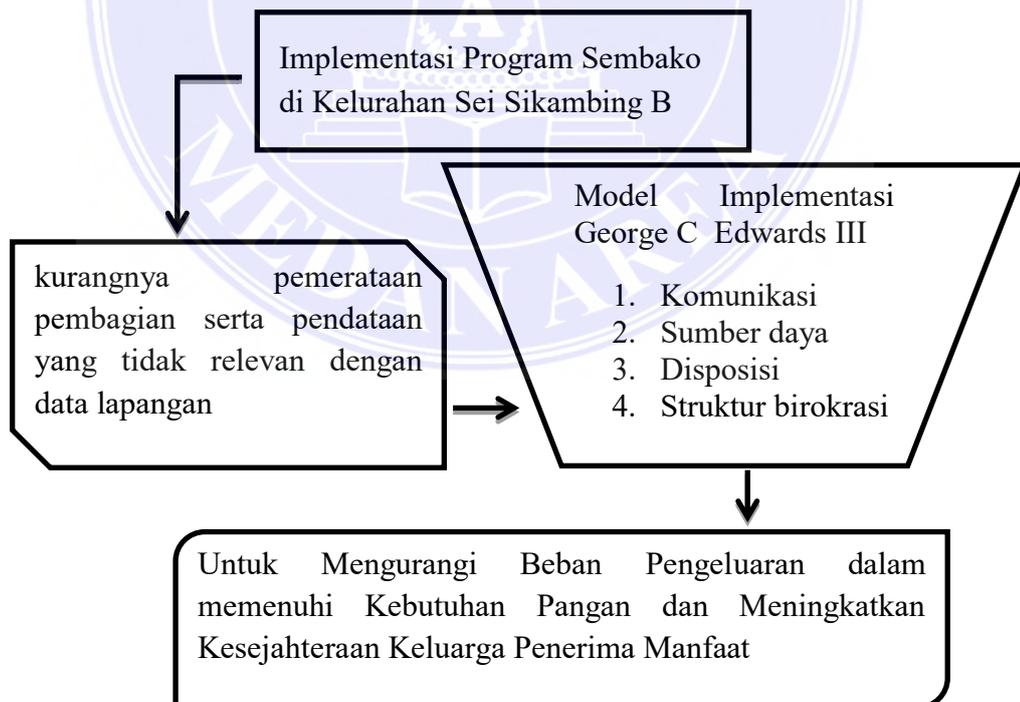
Perbedaan antara skripsi saya dengan penelitian yang dilakukan Azlan Suhaini adalah pada penelitian Azlan beliau meneliti di salah satu Kelurahan yang ada dikota Pekanbaru tepatnya kelurahan Tuah Karya pada tahun 2019 sedangkan pada penelitian saya meneliti disalah satu kelurahan yang ada dikota Medan tepatnya Kelurahan Sei Sikambing B pada tahun 2021, nama programnya masih BPNT sedangkan pada penelitian saya program tersebut telah ditransformasikan menjadi Program Sembako dimana tidak hanya nama saja yang berubah melainkan jenis komoditasnya dan juga besaran jumlah bantuannya bertambah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan teori implementasi dari Edward III dan kesamaan lainnya adalah menggunakan penelitian kualitatif.

2.5. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Program Sembako Pada Masa Pandemi *Covid-19*. Kerangka berpikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata. Peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan Model Implementasi Kebijakan – George C. Edward III.

Model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Gambar 2.2.
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang artinya data diambil bukan dari angka-angka, melainkan data yang berasal dari kata, wawancara, catatan lapangan, naskah dan dokumen resmi lainnya. Metode penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan.

Menurut Meleong dalam (Sugiyono, 2015 : 15), metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Menurut (Haris Herdiansyah, 2014 : 116) Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif adalah peneliti ingin memahami fenomena yang terjadi dan mendapatkan deskripsi yang utuh serta mendalam tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

3.2. Jadwal dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai Implementasi Program Sembako Pada Masa Pandemi *Covid-19* ini dilakukan di Kelurahan Sei Sikambang B yang terletak di Jalan Merak No.17 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Tabel 3.1
Jadwal dan waktu penelitian

No	Kegiatan	2020		2021		
		Okt-Nov	Des	Jan-Mar	Apr	Juni
1	Penyusunan dan Bimbingan Proposal					
2	Seminar Proposal					
3	Pengambilan Data Survei					
4	Pengumpulan Data					
5	Seminar Hasil					
6	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi					
7	Pengajuan Sidang Meja Hijau					
8	Sidang Meja Hijau					

3.3. Sumber Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif adalah data yang terdiri atas kata-kata dan tindakan, foto, sumber data tertulis, sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang berkaitan dengan sumber informasi yang menjadi fokus penelitian. Sumber data tersebut terdiri atas:

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data primer. Data primer diperolehnya sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. Data yang didapat dari responden yang masih

sangat polos, tidak menutup- nutupi atau mengganti dengan jalan pikirannya, diceritakan sesuai yang ia dapat atau ia lihat sendiri sesuai dengan keadaan senyatanya merupakan data murni. Di samping itu ada data yang tidak murni di mana informasinya sudah disesuaikan dengan jalan pikirannya sehingga informasinya lebih bersifat deplomatis. Kedua informasi dalam data primer ini tidak mempengaruhi dalam penelitian karena dikembalikan kapanpun hasil pembicaraan dengan responden, ia tetap sebagai sumber (Joko Subagyo, 2015 : 87).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat- surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Sumber sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukannya. Untuk itu peneliti harus mengetahui di mana bahan dapat diperoleh yang sesuai dengan menghemat waktu dan biaya. (Nasution, 2016 : 143).

3.4. Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014 : 139).

Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis

besar, tetapi juga memahami informasi tentang informan utama. Pada penelitian ini informan kuncinya adalah Lurah Sei Sikaming B.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Pada penelitian ini yang menjadi informan utamanya adalah Koordinator Palaksanaan dalam Program sembako , e-Warung/Agen BRILink yang mengurus bantuan Program Sembako, Kepala Lingkungan.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Sembako.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2018 : 224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi yang digunakan adalah metode observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi”.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Adapun model wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.

Menurut (Agustinus Bandur, 2014 : 94) Dalam semi-structured interviews peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk dijadikan panduan utama ketika melakukan wawancara. Pada awal wawancara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, lalu kemudian melanjutkan diskusi yang lebih spesifik berdasarkan jawaban partisipan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif agar mendapatkan hasil yang optimal dan benar-benar menemukan data sebagaimana terkandung dalam *natural setting*, maka selain teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, maka dilengkapi dengan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen dilakukan untuk melihat bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai pada masa pandemi Di Kelurahan Sei Sikambing B. Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan fokus penelitian seperti rekaman, foto informan, wawancara, dan kegiatan.

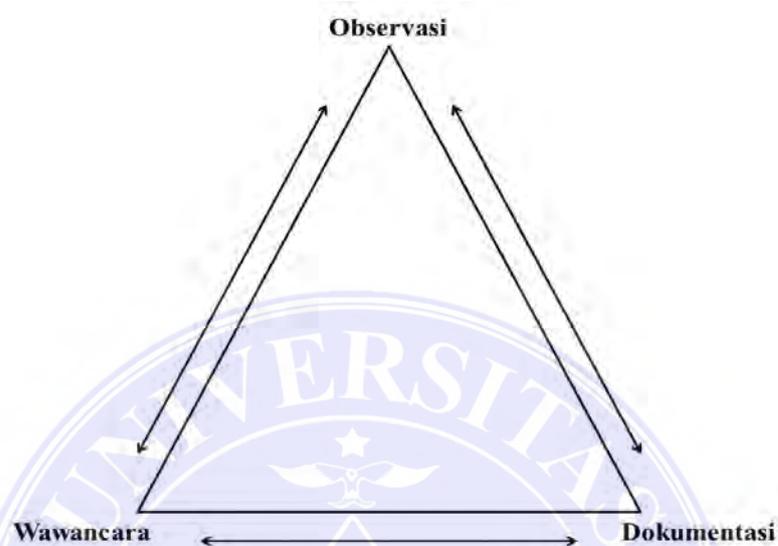
4. Triangulasi

Menurut (Danu Eko Agustinova, 2015 : 45) Dalam riset kualitatif demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pemeriksaan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Triangulasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Menurut (Imam Gunawan, 2016 : 218). Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di

lapangan. Kegiatan triangulasi dengan sendirinya mencakup proses pengujian hipotesis yang dibangun selama pengumpulan data.

Gambar 3.1 Triangulasi Metode



Sumber : *Sugiono (2018)*

Menurut (Aditya Ulil Mursidin, 2020 : 32) Triangulasi itu sebenarnya saling menguatkan atau menutup kelemahan satu sama lain, karena kita tahu tidak ada metode yang sempurna.

Seperti yang kita lihat pada gambar 3.1 triangulasi metode dapat kita gambarkan layaknya segitiga dimana metode observasi, wawancara, dan dokumentasi berada pada masing-masing sudutnya dihubungkan oleh garis panah bolak balik untuk menunjukkan interaksi antara metode satu sama lain. Dimana observasi disatu pihak menghasilkan data yang berfungsi mengecek data hasil wawancara.

Dilain pihak, metode wawancara memungkinkan penulis untuk memasuki sisi internal subyek-subyek yang telah diamati. Sementara metode dokumen dapat

menghasilkan informasi tentang latar suatu peristiwa atau gejala, yang tidak dapat diamati langsung atau tidak dapat dijawab oleh subyek penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Untuk mengelola dan menganalisa data, penulis menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif dari Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018 : 246) meliputi komponen diantaranya :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Setelah dikemukakan, semakin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, kemudian di cari tema dan polanya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing / Verification

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Menurut (Hamid Patilima, 2013:101) dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi, kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntunan sponsor. Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi uraian dipembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Implementasi program sembako pada masa pandemi covid-19 dikelurahan sei sikaming b kota medan belum berjalan dengan efektif dan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 1) Komunikasi, belum berjalan dengan efektif karena data penerima tidak relevan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat membuat komunikasi antara implementor dengan sasaran kurang berjalan dengan baik. 2) Sumber daya, sumber daya finansialnya belum memadai, Jumlah KPM yang mengalami perubahan dikarenakan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, mengenai sumber daya manusia pada tempat pengambilan sembako belum memadai karena Agen BRI Link hanya beranggotakan 5 orang. 3) Disposisi, tidak ditemukan implementor yang keluar dari jalurnya, para implementor komitmen, jujur dan demokratis dalam menjalankan pekerjaannya. 4) Struktur Birokrasi, Semua pihak telah mengikuti Standar Operasional Prosedur, pada masa pandemi semua tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
- b. Hambatan dalam implementasi program sembako pada masa pandemi covid-19 dikelurahan sei sikaming b kota medan yaitu ketidaktepatan sasaran seperti sudah mampu secara ekonomi, ketidakkonsistenan jadwal penyaluran, adanya permasalahan kartu rusak, adanya penolakan pendataan/verivalid dari masyarakat, adanya penerima bantuan yang pindah alamat dan sudah meninggal.

5.2.SARAN

Saran pada penelitian implementasi program sembako pada masa pandemi covid-19 dikelurahan sei sikambang b adalah sebagai berikut :

- a. Pada aspek komunikasi disarankan agar lebih lagi menambah jadwal sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami program sembako. Sumber daya pada agen ditambah lagi, agar pelaksana tidak kewalahan, untuk dana yang disalurkan kepada KPM disarankan agar tidak mengalami perubahan dengan begitu jumlah KPM juga tidak mengalami perubahan.
- b. Mengenai ketidaktepatan sasaran, pindah alamat atau bahkan meninggal dunia disarankan dilakukan pendataan ulang agar data masyarakat penerima bantuan dinyatakan relevan atau valid dan benar-benar penerima tersebut berhak mendapatkan bantuan. Mengenai jadwal penyalurannya itu seharusnya konsisten, agar KPM tau pasti kapan penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah, W. (2018). *Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustinova, D. E. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Bandur, A. (2014). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, & Teknik Analisis Data*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muda, I. (2019). *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (2016). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subagyo, J. (2015). *Metode Penelitian Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2007). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Prodi Kesehatan Masyarakat*, 4.
- Mursidin, A. U. (2020). Pemilihan pegadaian konvensional oleh masyarakat Dikota Pekanbaru. *Jurusan Sosiologi*, 32.
- Panuntun, H. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Ilmu Administrasi Publik*, 66-67

Suhaini, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam*, 52.

Pedoman Umum. (2020). *Program Sembako*, 7, 13-15.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. (2017). *Presiden Republik Indonesia* (pp. 3-4). Jakarta: Pemerintah Indonesia.

INTERNET

Cristy, M. D. (2020). *Covid-19*: Alodokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam <https://www.alodokter.com/covid-19>, Diakses 7 Oktober 2020

Cristy, M. D. (2020). *Virus Corona*: Alodokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam <https://www.alodokter.com/virus-corona>, Diakses 7 Oktober 2020



PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Informan Penelitian di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan :

a. Daftar Pertanyaan kepada Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan

1. Kapan program sembako dimulai di kelurahan sei sikambing b ?
2. Darimanakah data penerima bantuan diperoleh?
3. Bagaimana sosialisasi Program Sembako dilakukan kepada masyarakat ?
4. Apa saja yang termasuk dalam kriteria masyarakat penerima bantuan ?
5. Bagaimana alur pendistribusian program sembako ?
6. Berapa jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat (KPM) dari pemerintah ? Apakah sebelum dan sesudah pandemi jumlahnya berbeda ?
7. Apakah jumlah bantuan yang disalurkan disetiap kelurahan/daerah berbeda?
8. Tertulis di nomor berapa Undang-undang mengenai program sembako?
9. Apa saja kendala atau masalah yang dihadapi pihak kelurahan ?

b. Daftar Pertanyaan kepada E-warung/Agen BRI Link

1. Kapan masyarakat boleh mengambil bahan pangan penyaluran bantuan sembako tersebut ?
2. Apa saja yang menjadi syarat pengambilan bantuan?
3. Bagaimana kualitas bahan pangan yang masyarakat terima melalui program sembako ?
4. Adakah perubahan bahan pangan setiap tahun dalam pelaksanaannya ?
5. Apabila terjadi kerusakan bahan pangan siapa yang bertanggung jawab mengganti bahan pangan tersebut ?
6. Pernahkah masyarakat komplain mengenai bahan pangan?

7. Dimana saja letak E-Warung maupun Agen BRI Link di kelurahan sei sikaming b ?
8. Apakah masyarakat bebas mengambil bahan pangan di e-warung ataupun Agen BRI Link dimana saja?
9. Apakah ada pembagian masyarakat penerima kesetiap E-Warung maupun Agen BRI Link walaupun masyarakat boleh belanja dimana saja ?
10. Apa saja kendala atau hambatan yang dirasakan E-Warung maupun Agen BRI Link ?

c. Daftar Pertanyaan kepada Masyarakat Penerima Bantuan (KPM)

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai adanya program sembako ini, apakah program ini membantu ?
2. Selama berjalannya program ini bagaimana cara pemerintah baik koordinator maupun pendamping menyampaikan bahwa saldo direkening ibu sudah masuk ?
3. Apakah sumber daya manusia dalam penyaluran program ini menurut Bapak/Ibu sudah cukup?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana sikap dari penyalur di E-Warung/Agen BRI Link ini?
5. Apa yang membuat Bapak/Ibu lebih memilih mengambil bantuan sembako di E-Warung/Agen BRI Link ini?
6. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kelemahan dalam program sembako ini?
7. Apa saran yang ingin ibu berikan untuk kedepannya pada program sembako ini ?

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Sekretaris Lurah Bapak HUSNI IQBAL (18 Januari 2020)



Gambar 2. Wawancara dengan Koordinator pelaksana sekaligus Agen BRI Link ibu Helena Saragi (18 Januari 2021)



Gambar 3 dan 4. Bahan Pangan Bantuan Program Sembako (Diakses 18 Januari 2021)



Gambar 5 dan 6. Bahan Pangan Bantuan Program Sembako (Diakses 18 Januari 2021)



Gambar 7 dan 8. Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Program Sembako (KPM) (8 Februari 2021)



Gambar 9 dan 10. Proses Pengambilan Program Sembako Di Agen BRI Link Jln Tri Ubaya Sakti Timur (8 Februari 2021)



Gambar 11.
Masyarakat memilih bahan pangan sembako



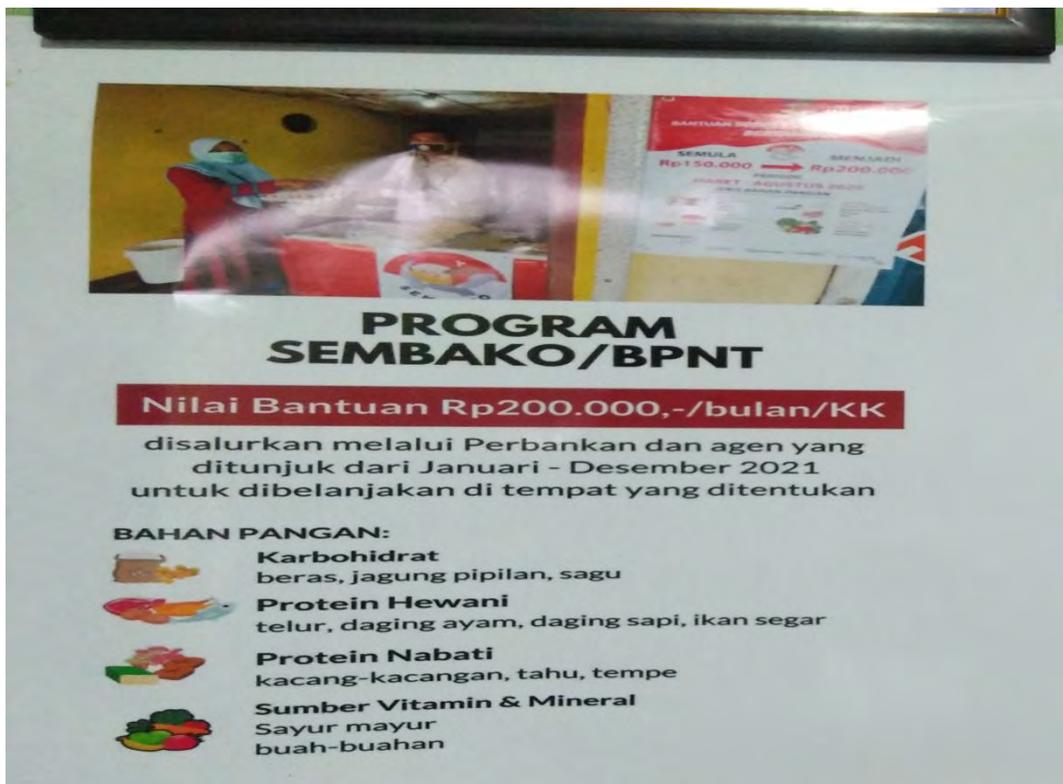
Gambar 12.
Struk Bukti Pembelian Sembako



Gambar 13.
Kartu Keluarga Sejahtera



Gambar 14.
Ikut serta dalam penyaluran bantuan program sembako (8 Februari 2021)



Gambar 15 & 16. Poster sosialisasi program sembako (Diakses 18 Januari 2021)